



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat sakral dalam kehidupan manusia, tak terkecuali bagi seorang Muslim. Bagi seorang Muslim, melaksanakan perkawinan merupakan suatu ibadah jika dilakukan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan tegas Rasulullah saw mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk sunnahnya, orang-rang yang berpaling dari sunnah Rasulullah tidaklah termasuk umatnya.¹

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan telah diatur dan diformalkan dalam bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Adapun peraturan tentang perkawinan yang sejalan dengan ajaran Islam dituangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khalik dalam segala aktivitas hidupnya. Namun di samping itu, manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Salah satu naluri yang sangat kuat di dalam diri manusia adalah

¹ Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Lihat Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz, hal. 1292.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 131

naluri seks. Pemenuhan kebutuhan biologis termasuk salah satu naluri manusiawi di samping juga sebagai suatu aktifitas dalam mempertahankan eksistensi jenisnya di muka bumi. Agar manusia bisa memenuhi nalurinya dan tetap dalam fitrahnya sebagai hamba Allah, maka aturan yang telah diturunkan oleh Allah SWT menjangkau permasalahan perkawinan.³

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Melalui undang-undang ini diketahui bahwa Negara mengakui eksistensi agama dalam mengatur perkawinan.

Dengan demikian, melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam merupakan bagian dari ibadah (usaha untuk memenuhi tuntunan agama), di samping juga merupakan memenuhi amanat undang-undang negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan naluri manusiawi. Oleh karena itu perkawinan menurut Islam merupakan hal yang perlu mendapat perhatian.

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah Swt.⁵

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, Media, 2003), hal. 22.

⁴ *Ibid*, hal. 23.

⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI, 1984), hal. 49.

Dalam pandangan Hukum Islam, ada beberapa definisi perkawinan yang dikemukakan oleh ulama. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan pernikahan dengan suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja.⁶ Ulama mazhab Maliki mendefinisikan nikah dengan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.⁷ Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah dengan suatu akad yang mengandung pemilikan "*watha*" dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya. Sementara ulama mazhab Hanbali mendefinisikan nikah dengan suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfhath (menikmati) kesenangan.⁸

⁶ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1415 H/ 1995 M), juz. 41, hal. 205.

⁷ Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazhab al-'Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 2-4.

⁸ *Ibid*, hal. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi isterinya. Di samping itu, karena perkawinan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban suami isteri, maka hubungan intim merupakan hak dari masing-masing pasangan suami isteri sekaligus kewajiban yang mesti dipenuhi apabila pasangan menghendaki. Dalam salah satu hadits Rasulullah saw bersabda:

إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya:

Jika seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, lantas si isteri menolak untuk memenuhinya. Maka malaikat melaknat si isteri sampai datang waktu subuh. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Di dalam mensyarahkan hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab *Fath al-Bari* mengatakan bahwa mengajak ke tempat tidur merupakan bahasa sindiran dari ajakan untuk berhubungan suami isteri. Apabila isteri menolak untuk melakukan hubungan suami isteri di saat tidak ada sebab yang membuat hubungan suami isteri itu dilarang seperti haidh, lalu suami tidak rela, maka sang isteri akan mendapat laknat. Laknat yang didapatkan isteri tersebut disebabkan karena hubungan suami isteri merupakan hak bagi suami.¹⁰

Berdasarkan hadits di atas banyak yang meyakini bahwa memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban isteri, sehingga kapan pun suami menginginkan, selama tidak ada halangan syar'i untuk melakukannya, maka isteri wajib untuk memenuhinya.

⁹ Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 1324. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 437.

¹⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, th), juz. 9, hal. 294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan pemikiran hukum. Perkembangan serta perubahan zaman dan waktu yang menyebabkan perubahan hukum merupakan hal yang diakomodir di dalam perkembangan pemikiran Hukum Islam karena perkembangan zaman merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Di dalam salah satu kaidah fiqh dinyatakan:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان¹¹

Artinya:

Tidak dapat disangkal bahwa berubahnya hukum disebabkan berubahnya zaman.

Banyak persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi di masa pembentukan hukum Islam, seiring perkembangan zaman terus bermunculan, sehingga persoalan-persoalan tersebut tidak memiliki ketetapan hukum dalam nash. Untuk menjawab hal tersebut dibutuhkan pengembangan pemikiran hukum Islam. Di samping itu hukum Islam bukanlah hukum yang turun di ruang hampa, ia turun untuk menjawab persoalan yang muncul dalam latar kondisi dan masa tertentu, sehingga perubahan kondisi dan masa bisa merubah suatu hukum. Contoh konkrit dari perubahan hukum ini bisa dilihat dari perkembangan pemikiran Imam al-Syafi'i yang melahirkan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

Perubahan kondisi dan masa serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merubah cara pandang masyarakat dalam memandang hak dan

¹¹ Muhammad Utsman Syubair, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Jordan : Dar al-Nafa'is, 1409 H/ 1989 M), hal. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban suami dan isteri di dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada masa lampau, memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban seorang isteri. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh pandangan keagamaan di tengah masyarakat, termasuk di antaranya hadits yang dikutip di atas. Akan tetapi pandangan di atas secara perlahan mulai mengalami pergeseran. Pergeseran pandangan tersebut muncul seiring munculnya gerakan emansipasi wanita yang menginginkan kesetaraan gender serta kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang selama ini dipandang sebagai warga kelas dua yang selalu tertindas diproteksi hak-hak mereka. Dalam konteks Indonesia, usaha untuk melindungi hak-hak wanita, terutama di dalam rumah tangga tampak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Kekerasan di dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik; seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.”¹²

Salah satu bentuk kekerasan yang dicantumkan di dalam pasal di atas adalah kekerasan seksual. Hal ini kembali ditegaskan di dalam pasal 5, di

¹² Tim Penyusun, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hal. 41.

mana bentuk-bentuk kekerasan yang diungkapkan di atas kembali ditegaskan.¹³

Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut: “Kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”¹⁴

Konsekuensi dari pasal ini adalah kemungkinan suami mendapatkan hukuman jika ia melakukan kekerasan seksual terhadap isterinya, termasuk salah satu bentuknya adalah pemaksaan melakukan hubungan intim yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Seperti yang terjadi pada salah seorang warga yang bernama Hari Ade Purwanto (29) yang mengajak isterinya berhubungan badan di hutan Nongkojajar, Pasuruan, Jawa Timur. Hari Ade Purwanto dihukum 1,5 tahun penjara karena dituduh memperkosa isterinya sendiri. Dalam permohonan kasasinya, Hari berdalih bahwa apa yang dilakukannya diperbolehkan dalam agama. Tetapi alasan ini ditolak Mahkamah Agung (MA).¹⁵

Seperti dilansir website MA, Senin (14/1/2013), sepulang kerja, Hari menjemput isterinya di depan kantor pada 20 Juli 2011 dengan motor. Lalu Hari menyuruh isterinya naik ke sepeda motor tetapi isterinya menolak. Hari mengancam akan ribut bertengkar di jalan serta akan menubruk isterinya dengan

¹³ *Ibid*, pasal 5.

¹⁴ *Ibid*, pasal 8.

¹⁵ Dipenjara karena “Perkosa” Isteri di Tengah Hutan, diakses tanggal 11 Juni 2014 dari www.tabloidnova.com.

sepeda motor jika tidak mau dibonceng. Isterinya ketakutan sehingga dengan terpaksa ia naik sepeda motor tersebut dan Hari membawa isterinya dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, Hari menyuruh isterinya berpegangan kencang apabila tidak, maka sepeda motor akan ditabrakkan. Sesampainya di daerah hutan, Hari menghentikan sepeda motornya dan mengajak isterinya berhubungan suami isteri, tetapi ditolak isterinya. Hari menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangan isterinya lalu terdakwa menyuruh “korban” duduk di tanah, setelah itu mendorong bahu isterinya ke tanah dan terjadilah pemerkosaan, demikian tulis dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas perbuatan Hari, pada 6 Maret 2012, Pengadilan Negeri Pasuruan menghukum Hari dengan hukuman 1 tahun 3 bulan karena melakukan kekerasan seksual pads isterinya. Hal ini melanggar pasal 46 UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Putusan ini dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya pads 14 Mei 2012. Tidak terima, Hari pun mengajukan kasasi ke MA. “Apa yang dilakukan saksi korban memenuhi hak suami melakukan hubungan suami dengan terdakwa di hutan Nongkojajar sesuai Kitab *Jam’ al-Fawaid* bab hak masing-masing suami isteri,” demikian alasan Hari seperti tertuang dalam berkas kasasi halaman.

Sejalan dengan putusan pada kasus di atas, simpulan hakim yustisi Mahkamah Agung (MA) Andi Akram menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), membuka peluang suami dipidana karena memaksa isteri bercinta. Dalam ranah hukum hal tersebut biasa, disebut *Marital Rape*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- ¹⁷ *Ibid.*



Marital Rape sehingga kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan tuntunan syara' bisa diminimalisir.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas tidak pernah disebutkan *Marital Rape* atau pemaksaan melakukan hubungan intim yang dilakukan suami terhadap isteri. Kekerasan seksual yang secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-undang tersebut adalah kekerasan seksual di dalam rumah tangga, yang bentuknya bisa saja pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak atau oleh tuan terhadap pembantunya. Adapun “pemeriksaan” di dalam hubungan perkawinan tidak secara tegas disebutkan. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, undang-undang ini kadang-kadang digunakan atau berpotensi digunakan untuk menjerat pelaku *Marital Rape*.

Sementara di sisi lain, di dalam Islam dipahami bahwa memenuhi kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban isteri, akan tetapi tidak ada pernyataan di dalam nash syara' bahwa seorang boleh memaksa isterinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun demikian nash-nash yang menyatakan kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami seringkali dipahami oleh sebagian kaum muslimin sebagai legalitas suami untuk memaksa isterinya berhubungan intim.

Inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti hal ini lebih mendalam dan mencari jawaban dari permasalahan ini, baik yang bersumber dari normatifal-Qur'an-hadis, maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya menuangkannya dalam bentuk karya tulis dengan judul: *Marital Rape*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam Tinjauan Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang membutuhkan analisa lebih mendalam dan membutuhkan jawaban hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum seorang suami memaksa isterinya untuk berhubungan intim.
2. Hukum seorang isteri yang menolak berhubungan intim ketika diajak suaminya.
3. Hukuman bagi seorang suami yang memaksa isterinya untuk berhubungan intim
4. Hukuman bagi seorang isteri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim.
5. Faktor penyebab terjadinya pemaksaan untuk berhubungan intim (*Marital Rape*).

C. Batasan Masalah

Masalah yang muncul sebagaimana dicantumkan di dalam identifikasi masalah di atas cukup luas dan beragam sementara alokasi waktu yang tersedia cukup terbatas, sehingga untuk lebih fokus dan tuntasnya permasalahan di dalam penelitian ini maka penulis membatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap *Marital Rape*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dicari jawaban dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan hubungan intim (*Marital Rape*)?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan hubungan intim (*Marital Rape*)?
3. Apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bertentangan dengan Hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Marital Rape* (pemaksaan yang dilakukan suami terhadap isteri untuk melakukan hubungan intim) ditinjau menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur di bidang pemikiran hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan persoalan hak dan kewajiban suami isteri.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister di bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran penulis terhadap koleksi tesis yang ada di perpustakaan Sultan Syarif Kasim Riau, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, baik ditinjau dari hukum positif maupun ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pertama dan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian *Marital Rape*

Kata *Marital Rape* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *Marital* yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dan *Rape* yang berarti perkosaan. Dari arti secara etimologi ini bisa dipahami bahwa *Marital Rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan. Perkosaan yang dimaksudkan di sini adalah pemaksaan untuk melakukan aktifitas seksual oleh satu pihak, yaitu suami terhadap isteri, atau sebaliknya. Namun, pengertian yang lebih umum dipahami oleh sebagian kalangan perihal *Marital Rape* adalah isteri yang mendapat tindak kekerasan oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga.¹⁸

¹⁸ Andy Darmawan, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW UIN Suska, 2004), hal. 314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian ini dapatlah dirumuskan bahwa bentuk-bentuk *Marital Rape* di antaranya adalah: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki karena ketidaksiapan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, (2) Hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai isteri atau suami, dan (3) Hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan.

Milda Marlia, mengutip LBH APIK mengatakan bahwa bentuk-bentuk tindakan *Marital Rape* antara lain adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lain yang tidak dikehendaki isteri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
- c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu sementara isteri tidak menyanggupinya.
- d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.
- e. Memaksa isteri untuk mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- f. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi.
- g. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman atau caci maki.
- h. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina, mengoleskan balsem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke dalam vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.¹⁹

Bentuk-bentuk *Marital Rape* ini tidak mutlak adanya demikian, dengan kata lain dari waktu ke waktu akan semakin variatif sifat dan bentuknya. Namun *Marital Rape* yang dimaksud disini adalah kekerasan seksual atau pemaksaan untuk berhubungan seksual secara umum yang dilakukan oleh suami terhadap istri, di mana istri merasa terpaksa (tidak ‘enjoy’) untuk melakukan hal itu karena ada faktor-faktor tertentu.

2. Hukum Islam

Term Hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan kesehariaannya mengandung *ambiguitas* (kerancuan), yaitu sebagai padanan syari’ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadits sebagai sumber orisinil Hukum Islam) di satu sisi, dan sebagai padanan fiqih (norma-norma hukum hasil olahan syari’ah oleh para ulama) di pihak lain.²⁰ Adapun Hukum Islam yang dimaksudkan di dalam penelitian ini mencakup dua hal di atas, yaitu syari’at dan fiqih.

¹⁹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta Pustaka Pesantren, 2007), hal. 8.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gems Media, 2001), hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pernikahan Serta Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Islam

Nikah menurut bahasa berarti *al-dhamm* (berhimpun) dan *al-jam'u* (berkumpul).²¹ Makna seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab:

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض²²

Artinya:

Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.

Ibnu al-Manzhur di dalam kitab *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa kata “nikah” secara bahasa juga dipahami dan dimaknai dengan *'aqd* (akad) dan *watha'* (hubungan intim/ *coitus*).²³ Di antara dua makna ini (akad dan *watha'*), ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang mana yang menjadi makna hakikat dari kalimat “nikah” tersebut.²⁴

Ada tiga pendapat yang muncul di kalangan ulama tentang makna *haqiqah* (hakiki) kata “nikah”. Pendapat pertama mengatakan bahwa makna

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 M/ 1985 M), juz. 7, hal. 29. Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 208 dan 828.

²² Sayyid al-Bakri Syatha al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 1999), juz. 3, hal. 254.

²³ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-lhya' al-Turats al-Arabi, 1409 H/ 1989), juz. 14, hal. 277.

²⁴ Makna *haqiqah* (hakiki) adalah makna asal yang diperuntukkan untuk kata tersebut. Di dalam sebuah kaidah dinyatakan. Pada dasarnya makna yang dipahami dari sebuah pembicaraan adalah makna *haqiqah*. Lawan dari makna *haqiqah* adalah makna *majazi*, yaitu makna kata yang dipakai tidak makna dasarnya (makna yang diperuntukkan baginya), akan tetapi makna lain karena ada hubungan di antara makna *haqiqah* dan makna *majazi* serta adanya indikasi yang menghalangi pemakaian makna *haqiqah* tersebut. Contohnya mengartikan kata *al-asad* (singa) dengan laki-laki pemberani. Laki-laki pemberani dan singa memiliki keaamaan (hubungan) yaitu sama-sama memiliki keberanian. Memahami kata “asad” dengan makna laki-laki pemberani disebut dengan makna *majazi*. Dalam kaidah ushul disebutkan “Apabila suatu kalimat tidak bisa diartikan secara hakiki (*haqiqah*), maka dapat diartikan secara *majazi*”. Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Mu'assasah al-Qurthubah, 1407 H/ 1987 M), hal. 331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiki nikah adalah *watha'* (hubungan intim), sementara memahami nikah dengan makna *'aqad* adalah pemaknaan secara majazi. Sekiranya kata “nikah” terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah tanpa adanya indikasi lain, maka yang dimaksud adalah hubungan intim. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah,²⁵ sebagian ulama Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Di antara ulama kontemporer yang memegang pendapat ini adalah Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.²⁶

Pendapat kedua mengatakan sebaliknya, makna hakikat nikah adalah akad, sedangkan pemaknaannya dengan *watha'* adalah pemaknaan secara majazi. Pendapat ini dipegang oleh Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah,²⁷ dan sebagian ulama Hanabilah.²⁸

Pendapat ketiga mengatakan bahwa *'aqd* dan *watha'* sama-sama makna hakiki dari kata “nikah.”

Di dalam al-Qur'an, pembicaraan tentang pernikahan selalu diungkapkan dengan kalimat “nikah” dan “*tazwij*.” Kata “*tazwij*” dengan semua bentuk derivasinya terulang di dalam al-Qur'an lebih kurang 20 kali, sementara kata “nikah” dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak lebih kurang 17 kali.²⁹

²⁵ Syamsuddin al-Sarakhsy, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), juz. 4, hal. 192.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 M/1985 M), juz. 7, hal. 30.

²⁷ Sayyid al-Bakri Syatha al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, 1999), juz. 3, hal. 256.

²⁸ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1994), juz. 41, hal. 205-206.

²⁹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar at-Fikr, 1987), hal. 332-333 dan hal. 718.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:³⁰

a. Ulama Mazhab Hanafi

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة بالانثى قصدا

Artinya:

*Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja.*³¹

b. Ulama Mazhab Maliki

النكاح عقد يتضمن الحكم لاباحة الوطء ويتمتع ما في زوجته ينكحها

Artinya:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.

c. Ulama Mazhab Syafi'i

النكاح عقد يتضمن للوطء بالفاظ انكاح او تزويج او مثلها

Artinya:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan "wath'" dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.

d. Ulama Mazhab Hanbali

النكاح هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya:

Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

³⁰ Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-'Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 6.

³¹ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1405 H/ 1995 M), juz. 41, hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para imam mazhab di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad antara pria dan wanita untuk saling memiliki dan bersenang-senang dalam pergaulan suami isteri (*istimta'*) dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga dengan menggunakan kata-kata "*al-nikah*" atau "*al-tazwij*" atau menggunakan kata lain yang semakna dengan kata tersebut.

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Secara garis besar hak dan kewajiban suami isteri bisa dikelompokkan kepada tiga kelompok, yaitu hak isteri, hak suami dan hak bersama. Hak isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isterinya. Hak suami merupakan kewajiban isteri yang harus ditunaikan kepada suaminya. Sedangkan hak bersama merupakan kewajiban kedua belah pihak yang harus ditunaikan kepada pasangannya masing-masing. Adapun hak isteri adalah sebagai berikut:

a. Hak Materil

Hak materil isteri ada dua macam, yaitu mahar dan nafkah. Kewajiban suami untuk menyerahkan mahar kepada isterinya termaktub di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang harus diberikan oleh seorang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.³²

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 M/1985 M), juz. 7, hal. 327-328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan ayat 228, serta surat al-Thalaq ayat 6-7. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Mu'awwiyah al-Qusyairi dijelaskan bahwa:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ³³

Artinya:

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hak isteri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Kamu berikan dia makan jika kamu makan, kamu berikan dia pakaian jika kamu mengenakan pakaian, jangan kamu pukul wajahnya, dan jangan kamu buat dia menjadi buruk dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah. (HR. Abu Daud).

Nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah yang terdiri dari kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁴

b. Hak Non Materil

Hak non materil isteri ada tiga macam, yaitu hubungan baik, perlakuan baik dan keadilan. Kewajiban suami untuk berhubungan baik dengan isterinya terdapat di dalam surat al-Nisa' ayat 19. Di dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

استوصوا بالنساء خيرا فانما هي عندكم عوان ليس تملكون منهن

³³ Abu Daud Sulaiman ibn al-'Atsyats, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 210.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid. 4, hal. 1343.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شيئا غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان فعلمن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلا³⁵

Artinya:

Jagalah dengan baik kaum wanita, sesungguhnya mereka merupakan tawanan kalian, yang kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu, kecuali mereka mendatangkan kekejian yang jelas, tinggalkanlah tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka menurut kepada kalian maka jangan cari jalan untuk menganiaya mereka. (HR. Al-Tirmidzi).

Di samping hak-hak di atas, suami juga harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya apabila ia memiliki lebih dari satu orang isteri. Adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam pembagian nafkah dan malam.³⁶

Adapun hak suami yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh isteri adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Ketaatan isteri dalam hal persetubuhan dan pergi keluar dari rumah

Seorang isteri harus mentaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si isteri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagai mana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, selama hal itu tidak membuat si isteri melalaikan kewajibannya, atau menimbulkan keburukan pada si isteri.

- b. Amanah

³⁵ Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Sulami, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 469.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid. 4, hal. 1344

³⁷ *Ibid*, hal. 1345-1347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang isteri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.

c. Perlakuan yang baik

Seorang isteri harus memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah diri dari berbuat aniaya dan lain sebagainya. Sebagaimana suami juga harus memperlakukan isterinya dengan baik.

d. Hak untuk memberikan pelajaran

Seorang suami berhak untuk memberikan pelajaran kepada isterinya ketika si isteri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan kepada Allah Swt sebagaimana tertera di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 34.

e. Mandi setelah selesai masa haid, nifas dan junub

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa suami berhak memaksa isterinya untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas. Karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli isterinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa isterinya untuk menghilangkan perkara yang bisa menghalangi haknya.

f. Melakukan perjalanan bersama isteri

Kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan isterinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dipenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hak bersama adalah hak untuk saling bersenang-senang (*istimta'*), yaitu hak untuk bersetubuh. Seorang suami memiliki hak untuk menikmati (menyetubuhi) isterinya sebagai mana dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas (Malaikat melaknat isteri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur). Sementara isteri juga berhak untuk digauli oleh suaminya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa persetubuhan wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i berpendapat persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena hal tersebut merupakan hak suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta, oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa suami wajib menggauli isterinya sekurang-kurangnya satu kali empat bulan kalau tidak ada halangan. Jika suami menolak untuk menggauli isterinya setelah lewat masa empat bulan, maka keduanya dipisahkan sebagaimana halnya keduanya dipisahkan akibat *al-'ila'*.³⁸

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 M/1985 M), juz. 7, hal. 342.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka penelitian ini menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan.³⁹ Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁴⁰ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada data-data yang terkait dengan tema pembahasan.

³⁹ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 125. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

⁴⁰ Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 3. Adapun penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini -dengan meminjam kerangka berpikir Mufidah Saggaf Aljufri dalam disertasinya- didasari atas pertimbangan sebagai berikut: [1] Pemahaman dan pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. [2] Data yang dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubungan dengan pemahaman serta pengalaman nilai-nilai agama. [3] Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan, pemahaman, dan sifat individu secara holistik. [4] Metode kualitatif memungkinkan untuk memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam lingkungannya. [5] Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya. (Lihat. Mufidah Saggaf Aljufri, "Pembaruan Hukum Islam menurut Jama' al-Banna>," Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 23-24).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu data primer⁴¹ dan data sekunder.⁴² Data primer di dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kitab-kitab fiqh yang berbicara tentang hal tersebut. Untuk mewakili mazhab-mazhab fiqh yang ada, maka penulis mengambil beberapa kitab sebagai rujukan utama dari masing-masing mazhab. Dari literatur fiqh mazhab Hanafi diambil kitab *al-Mabsuth* karya Syamsuddin al-Sarakhsi, dari literatur fiqh mazhab Maliki diambil kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik. Dari literatur fiqh mazhab Syafi'i diambil kitab *al-Majmu'* karya al-Nawawi, dan dari literatur fiqh mazhab Hanbali diambil kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Sementara dari literatur fiqh kontemporer diambil kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data lain, baik yang berbentuk buku, artikel maupun pemberitaan media masa yang ada kaitannya dengan bahasan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode

⁴¹ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

⁴² Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer, lihat Ronny Hanityo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara ilmiah.⁴³

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*),⁴⁴ yakni metode analisis yang diarahkan pada materi atau teks yang terdapat dalam subyek penelitian. Haltsi, sebagaimana dikutip oleh Mastuhu, mengatakan bahwa *content analysis* adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴⁵

Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian mengkompilasi pemikiran ulama klasik maupun kontemporer tentang hak dan kewajiban suami isteri, terutama yang

⁴³ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hal. 86.

⁴⁴ Dapat diartikan analisis isi atau kajian isi, merupakan analisis ilmiah tentang isi pecan suatu komunitas, lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49. Soedjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 18.

⁴⁵ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hal. 13.

berkaitan dengan nafkah batin. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi sejarah terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tujuan, proses penyusunan, uraian singkat seputar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan pandangan masyarakat terhadap rumah tangga.

Bab ketiga, konsep *nusyuz* dalam Islam dan relevansinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi: pengertian terminologi *nusyuz*, tinjauan atas kekerasan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam, pandangan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga, reinterpretasi fiqih tentang kekerasan dalam rumah tangga, kepemimpinan dalam keluarga, dan upaya penyelesaian dalam persoalan *nusyuz*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat, pemaksaan suami terhadap isteri untuk berhubungan intim dalam pandangan Undang-undang PKDRT dan hukum Islam, meliputi: kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kriteria pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual, analisis tentang larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga menurut Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan tinjauan terhadap Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual menurut Hukum Islam.

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.